

**KAJIAN FILOSOFIS KONSEP *HIGH POLITICS* AMIEN RAIS
DAN KORELASINYA DENGAN PENAFSIRAN BUYA HAMKA
DALAM *TAFSIR AL-AZHAR***

Muhammad Khoirul Anwar

Universitas PTIQ Jakarta

khoirulanwar@ptiq.ac.id

Abstract: *This article aims to conduct a philosophical review of the concept of High Politics initiated by Amien Rais and offered to be a reference for Muhammadiyah in 1986 in organizing. The aim is to address political dynamics in Indonesia to have a moral framework in the context of following the dynamics of political progress. This paper questions the extent of this insight when viewed from the perspective of Buya Hamka's, which is also a critical Muhammadiyah actor. Buya Hamka and Amien Rais were involved in determining Muhammadiyah to have a political view as a responsive attitude to the political dynamics of the time. This study is a literature study using Karl Menheim's sociology of knowledge approach to philosophically examine the ideas of High Politics with Hamka's political ideas when interpreting verses that contain values contained in high politics. This article concludes that there is no significant difference between the high politics framework and Hamka's idea of the verses used as a foothold in the high politics formula, only when Amien Rais formulates the framework, there is no opinion that refers to buya Hamka. Likewise, with Hamka there is no serious tendency in his interpretation of formulating political cases. However, both of them have the same orientation regarding the essence of politics and da'wah as a means of creating the general good and amar maruf nahi munkar. Likewise with the state system, both of them also have in common that they see the state system as taught by Islam as prioritizing deliberation or democracy and not being centralized. These two views that were born in different eras are equally intertwined with the dynamics in the Muhammadiyah organization, which is faced with an unstable political atmosphere.*

Keyword: *High politics, Amien Rais, Tafsir al-Azhar, Muhammadiyah*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan filosofis atas konsep *High Politics* yang digagas oleh Amien Rais dan ditawarkan agar menjadi acuan Muhammadiyah pada tahun 1986 dalam berorganisasi. Tulisan ini mempertanyakan sejauhmana wawasan tersebut jika dilihat dari perspektif *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka yang juga merupakan aktor penting Muhammadiyah. Artikel ini berkesimpulan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara kerangka *high politics* dengan gagasan Hamka terhadap ayat-ayat yang digunakan sebagai pijakan dalam rumusan *high politics*, hanya saja ketika Amien Rais merumuskan kerangka tersebut tidak ditemukan pendapat yang merujuk pada buya Hamka. Demikian pula dengan Hamka tidak ada tendensi yang serius dalam tafsirnya memberikan rumusan perkara politik. Namun keduanya memiliki orientasi yang sama terkait esensi politik dan dakwah sebagai sarana menciptakan kemaslahatan umum serta amar makruf nahi munkar.

Kata kunci: *high politics, Amien Rais, Tafsir Al-Azhar, Muhammadiyah*

PENDAHULUAN

Keterlibatan Islam dalam diskursus politik tidak hanya berada pada konteks gerakan tetapi juga dalam konteks pemikiran dan keilmuan. Oleh sebab itu sampai saat ini diskursus tentang politik masih sangat kontekstual dan aktual. Beberapa tokoh Islam yang seringkali

dirujuk dalam pandangan politiknya misalnya Ibnu Taimiyyah dalam Kitab *Siyasah al-Syar'iyah*, atau al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah*.

Gagasan dua ulama tersebut masih diperbincangkan sebagai rujukan dalam diskursus politik Islam. Bahkan berdasarkan rujukan itu ada sebagian kelompok Islam yang menegaskan bahwa Islam bukanlah seputar agama saja melainkan juga negara atau kekuasaan. Di antara prinsip-prinsip Islam yang mengilhami pemikiran tersebut misalnya berangkat dari konsep Islam yang menegaskan bahwa wajib hukumnya mengurus dan melayani kepentingan manusia, sehingga ditafsirkan jika merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpa keduanya.

Tujuan penting yang hendak dicapai adalah menegakkan kemaslahatan umat yang sesuai dengan cita-cita dan etika Islam. Di sinilah umat Islam baik secara individual maupun komunal ada yang memiliki kepentingan untuk masuk pada ranah politik ini. Misalnya pendapat Ibnu Qayyim yang sering dikutip terkait tugas pokok politik Islam adalah mewujudkan suatu tindakan untuk membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah melalui Al-Qur'an tidak menentukan jenis politik tertentu.¹

Prinsip tersebut juga ditafsirkan dalam suatu konsep pemikiran politik yang sering disuarakan oleh sebagian umat Islam. Misalnya Hasan Al Banna menjelaskan politik merupakan persoalan internal (yang mencakup diantaranya: mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa) dan eksternal umat (yang meliputi diantaranya: memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak lain).²

Pemikiran al-Banna sendiri sangat populer di Indonesia bahkan menginspirasi gerakan-gerakan komunitas Islam tertentu yang mengklaim sebagai bagian dari representasi ajaran Islam. Ormas Muhammadiyah dalam dinamika sosialnya tidak lepas dari keterlibatan diskursus tersebut. Sebagai Ormas Islam Muhammadiyah tidak mengisolasi dirinya dari wacana politik Islam, meskipun secara langsung menegaskan dirinya bukanlah Organisasi politik tetapi beberapa pengurus dan kader-kadernya terlibat dalam politik praktis seperti Amien Rais.

¹ Burnuddin Yusuf, "Politik Dalam Islam: Makna Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," *Aqidah-TA* 4, no. 1 (2018). h. 118

² Abdullah Zawawi, "Politik Dalam Pandangan Islam," *Ummul Qura* 5, no. 1 (2015). h. 85-90

Pada tanggal 13 Oktober 1986 Amien Rais mengenalkan konsep *high politics* sebagai pedoman berpolitik di tubuh Muhammadiyah seraya memberikan penegasan kembali meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi tidak berarti anti terhadap politik.³ Konsep *high politics* yang ditawarkan oleh Amien Rais ialah sikap berpolitik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral etis. Selanjutnya Amien Rais juga memberikan penegasan atas konsep yang dimaksud dan bukti realistiknya sebagai organisasi yang menjalankan konsep tersebut, yaitu bersikap tegas terhadap korupsi, memerangi ketidakadilan serta mendukung konsep demokrasi dan keterbukaan.⁴

Amien Rais dalam konsep ini juga tidak lepas dari penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai argumentasi teologis. Dengan demikian menarik untuk dilihat korelasi gagasan *high politics* dengan penafsiran ayat-ayat yang digunakan dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka sebagai pembesar Muhammadiyah. Hadirnya Hamka dalam organisasi Muhammadiyah juga memberikan kontribusi besar mulai dari berkiprah di Lembaga Pendidikan sampai terlibat dalam perumusan sikap Muhammadiyah ketika hendak menghadapi Pemilu 1955.⁵ Pertanyaan yang diajukan adalah sejauhmana keterkaitan konsep *high politics* dengan penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*?

Riset ini menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim sebagai pisau analisis. Dalam pandangan sosiolog abad 20 itu menegaskan bahwa pengetahuan yang muncul bukan lahir dari ruang hampa melainkan memiliki akar sosio-historis yang mengitarinya. Oleh karena itu sosiologi pengetahuan mendorong untuk melihat dinamika politik, ekonomi dan budaya yang bersamaan dengan munculnya suatu pengetahuan yang merupakan suatu produk totalitas yang melibatkan perasaan, dan pengalaman yang mendasar.⁶ Teori tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam kerangka filosofis terhadap konsep *high politics* dan penafsiran Hamka atas ayat-ayat yang berbicara tentang etika politik. Sosiologi pengetahuan Karl Mannheim ini juga berbicara seputar ideologi dan utopia. Menurutnya, sangat tidak bisa terjadi upaya memahami pemikiran sosial tanpa melihat adanya benturan-benturan pada saat peristiwa itu terjadi. Sebab ide-ide lahir dari rakyat untuk suatu perjuangan atas isu-isu penting yang berhadapan dengan mereka. Namun dalam kacamata

³ Auri Adam, "High Politics Sebagai Kerangka Moral Pemikiran Politik Muhammadiyah," *Bestari* (Malang, 1999). h. 44

⁴ Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita Dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1996). h. 74

⁵ Tedy Choerul Kamal dan Agus Mulyana, "Peranan Buya Hamka Dalam Pembaharuan Muhammadiyah Tahun 1925-1966," *Factum* 8, no. 2 (2019). h. 218-220

⁶ Hamka, "Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim," *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, no. 1 (2020). h. 74

Mannheim, ideologi merupakan produk yang lahir dari keinginan yang tidak sepenuhnya mengandung kebenaran (subyektif).⁷

Beberapa riset sebelumnya yang berkaitan dengan kajian ini antara lain riset seputar dinamika berpolitik Muhammadiyah yang dilakukan Kasman Bakry, dkk dengan judul, "Political Dynamics of Muhammadiyah and its Relevance to the Concept of the State in Islam,"⁸ melihat korelasi prinsip Muhammadiyah yang membawa semangat kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan gerakan kelompok yang mengusung negara Islam. Kajian yang hampir bersamaan juga dilakukan oleh Gustav Brown dan Amelia Fauzia dengan judul, "Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia."⁹ Artikel tersebut melihat peranan penting Muhammadiyah dalam melakukan konter terhadap narasi negara Islam. Riset lain oleh Haedar Nashir, dkk dengan judul, "Muhammadiyah's Moderation Stance in the 2019 General Election"¹⁰ melihat komitmen berpolitik Muhammadiyah pada Pemilu 2019 dengan pilihan *high politics* bukan *low politics* berdasarkan asas dasar yang menjadi prinsip Muhammadiyah.

Kajian ini juga berkaitan dengan riset atas Tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah khususnya yang berbicara terkait dengan isu politik. Terdapat karya Siti Mariatul Kiptiyah¹¹ yang secara spesifik melakukan kajian atas Tafsir Organisasi Muhammadiyah yang ditulis dengan bahasa Jawa Aksara Carakan. Karya tersebut memotret kemodernan Muhammadiyah di tengah konservatisme dan perseteruan politik yang melibatkan para pemuka agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang terdapat di perpustakaan untuk dijadikan sebagai dasar kegiatan penelitian. Literatur atau pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal, prosiding dan laporan penelitian sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis konten

⁷ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia* (London: Routledge, 1960). h. 336

⁸ Kasjim Kasman Bakry, Ambo Asse, Darussalam Syamsuddin, Salenda and Roziana Shaari, "Political Dynamics of Muhammadiyah and Its Relevance to the Concept of the State in Islam," *al-Adalah* 17, no. 2 (2020).

⁹ Gustav Brown dan Amelia Fauzia, "Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-Making in Indonesia," *Asia Studies Review* 43, no. 19 (2019).

¹⁰ dkk Haedar Nashir, "Muhammadiyah's Moderation Stance in the 2019 General Election," *Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (2019).

¹¹ Siti Mariatul Kiptiyah, *Warisan Islam Nusantara: Tafsir Al-Qur'an Carakan Dan Narasi Reformisme* (Semarang: eLSA Press, 2020).

(*content analysis*). Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data setelah pengumpulan data.

PEMBAHASAN

1. Seputar *High Politics* dan Amien Rais

Tinjauah *high politics* secara bahasa terdiri dari kata *high* dan *politics*. Secara etimologis, kata *politics* berasal dari bahasa Yunani *polis* berarti yang negara kota. Orang yang mendiami *polis* disebut *polites* yang berarti warga negara, sedangkan muncul istilah *politikos* berarti kewarganegaraan. Dari istilah ini muncul *politike techne* yang berarti kemahiran politik. *Ars politica* yang berarti kemahiran tentang kenegaraan. *Politike episteme* berarti ilmu politik. Dari kata inilah kata politik yang kita gunakan saat ini berasal.¹²

Politik dalam bahasa Arab disebut *Siyasyah* atau dalam bahasa Inggrisnya *Politic*. Politik sendiri memiliki arti cerdas atau bijaksana. Dalam keseharian, banyak yang mengartikan politik sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Dalam buku *A New Handbook of Political Science* sebagaimana yang dikutip oleh Sahya menyebutkan bahwa politik adalah *the constrained use of social power* (penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan). Kata “kekuasaan sosial” ditekankan untuk membedakannya dengan “kekuasaan individual.” Ini karena politik berkenaan dengan pengaturan hidup suatu masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang mengesahkan sekelompok individu untuk memiliki “kekuasaan sosial” yang aplikasinya “dapat dipaksakan” atas setiap individu untuk menjamin keteraturan dalam masyarakat itu sendiri.¹³

Pada dasarnya, politik memiliki ruang lingkup negara sehingga membahas tentang politik maka artinya membahas tentang negara, karena teori politik sendiri menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Selain itu, politik juga menyelidiki tentang ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara serta bentuk tujuan negara, di samping juga menyelidiki hahl-hal seperti *pressure group*, *interest group*, elit politik, pendapat umum (*public opinion*), peranan partai politik dan pemilihan umum.¹⁴

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar, ketika menghadapi fenomena sosial yang menjurus kepada kezaliman, penindasan, kemunkaran, dan ketidakadilan terhadap sesama manusia, maka sikap sikap Muhammadiyah dengan tegas

¹² Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi Dan Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). h. 89-90

¹³ Sahya Anggara, *Pengantar Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). h. 3

¹⁴ Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Politik*, Jakarta: Aneka Cipta, 2000, hal. 18.

menentang dan berusaha menghilangkan fenomena tersebut. Dengan demikian seiring dengan dikembangkannya strategi dakwah amar makruf nahi munkar, Amien Rais mengemukakan sebuah gagasan yang diberinya nama “*high politics*” dalam sebuah Seminar Bulanan di Laboratorium Dakwah Yayasan Shalahuddin Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 1986.

Posisi Amien Rais sendiri merupakan kader Muhammadiyah yang bermula meniti karir pada lingkup akademik. Sebagai seorang yang lahir dari keluarga terpelajar dan aktivis, bahkan ibunya pernah menjadi pengurus Partai Politik Masyumi era keemasannya tahun 1950an serta menjadi ketua Aisyiyah Surakarta.¹⁵ Amien Rais semasa kecilnya memang tumbuh dan besar di lingkungan Muhammadiyah, termasuk lembaga pendidikan dimana Amien belajar dan puncaknya ketika pulang dari Universitas Chicago usai meraih gelar Ph.D pada tahun 1981. Sedangkan pada tahun 1985-1989 ia menjabat sebagai ketua Majelis Tabligh dan Anggota Pengurus Pusan Muhammadiyah dan pada tahun 1993 diangkat sebagai ketua Pimpinan Pusat (PP).

Amien Rais era itu dikenal sebagai sosok vokal memberikan kontribusi di bidang pemikiran politik dengan gagasannya yang dilandaskan pada tauhid sosial dan amar makruf nahi munkar. Dari dinamika panjang inilah yang pernah disebut oleh Amien Rais saat memutuskan diri terjun pada Partai Politik (PAN) yang ia dirikan pada masa runtuhnya Orba tahun 1998 sebagai “ijtihad politik.”¹⁶

Gagasan *High politics* yang diusung oleh Amien Rais pada tahun 1986 ini pada dasarnya merupakan rujukan moral yang harus dilakukan oleh setiap aktor politik dalam menjalankan kekuasaannya. Sebab menurutnya, kekuasaan berasal dari sebuah kekuasaan, maka dapat dirasakan betapa pentingnya memperhatikan sejumlah rambu-rambu yang mesti ditaati dan dipatuhi oleh setiap aktor politik.¹⁷ Gagasan Amien Rais ini muncul di saat era Orde Baru yang sudah berlangsung selama 20 tahun, dari 11 Maret 1966. Secara dinamika politik, Orde Baru saat itu sudah secara masif mendapatkan kritik dari beberapa pihak khususnya saat penetapan Asas Tunggal, sedangkan posisi Amien Rais dalam kontribusinya di bidang politik dengan misi amar makruf nahi munkar cukup diperhitungkan, khususnya pada saat dirinya ikut mendirikan ICMI (Ikatan Cendekia Muslim Indonesia).

¹⁵ Muhammad Najib, *Melawan Arus: Pikiran Dan Langkah Politik Amien Rais* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1999). h. 81

¹⁶ Muhammad Najib, *Amien Rais: Dari Yogya Ke Bina Graha* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999). h. 22

¹⁷ Auri Adam, “High Politics Sebagai Kerangka Moral Pemikiran Politik Muhammadiyah.” h. 44

Gagasan politik Amien Rais terlihat jelas ketika menyampaikan pidato politik saat dekrulasi PAN. Muhammad Najib dalam bukunya memuat beberapa pidato yang disampaikan, salah satu yang menjadi perhatian Amien adalah terbentuknya negara demokrasi berbasis musyawarah yang menurutnya merupakan perintah Al-Qur'an.¹⁸ Gagasan ini digunakan menyoroti imbas dari kepemimpinan yang otoriter di Indonesia semenjak merdeka, padahal menurut Amien konsep kepemimpinan yang baik adalah yang mengedepankan musyawarah.

Gambaran politik pasca reformasi 1998, Indonesia memang mengalami perubahan yang cukup besar dalam sistem politiknya. Salah satu aspek penting dalam bidang politik yang menjadi sasaran utama perubahan adalah kekuasaan pemerintahan Soeharto yang dikelola secara sentralistik, meskipun dalam perbincangan akademik ada pendapat yang menegaskan jika kekuasaan yang sentralistik tidak senantiasa buruk. Misalnya dalam gagasan Plato tentang *The philosopher king* setidaknya menunjukkan bahwa kekuasaan sentralistik, jika dijalankan oleh seorang penguasa yang amat bijaksana dapat menghasilkan hal-hal positif bagi perkembangan masyarakat, keadilan, kesejahteraan dan integrasi bagi negara tersebut.

Namun yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya, pemerintahan otoriter selama 32 tahun menutup akses demokrasi bagi rakyat, sehingga kejatuhan pemerintahan Soeharto disambut gembira oleh sebagian besar kalangan rakyat Indonesia. Pada saat itu sistem politik Indonesia berganti dari otoriter menuju reformasi yang dicirikan dengan liberalisasi politik dan ekonomi. Setelah Presiden Soeharto turun, pengaktifan hak-hak rakyat terlihat dari adanya suatu partisipasi politik yang tinggi dari rakyat, jumlah partai politik peserta pemilu 1999 pun mengalami lonjakan.¹⁹

Dalam perjalanannya, sistem politik di Indonesia pasca reformasi menunjukkan perubahan yang cepat. Terdapat perkembangan positif bahwa dengan runtuhnya rezim Soeharto, kebebasan sipil yang dulu tidak bisa dinikmati kini dapat dinikmati walaupun terkadang sering kali keluar dari norma-norma yang berlaku. Terlepas dari itu, masyarakat kini lebih bebas berpendapat, menyuarakan aspirasinya dan berpolitik.²⁰

Pengalaman selama masa Orde Lama dan Orde Baru cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan sistem

¹⁸ Muhammad Najib, *Amien Rais: Dari Yogya Ke Bina Graha*. h. 30

¹⁹ M C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Yogyakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005). h. 350

²⁰ Cut Maya Aprita Sari, *Perubahan Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi 1998, Keadilan Sosial, dan Deficit Demokrasi Hingga Kini*, dikutip dari www.researchgate.net diakses pada tanggal 15 September 2020.

politik yang stabil, malah sebaliknya timbul beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik, karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada.

Lazimnya memang kekuatan sistem politik memerlukan tingkat dukungan yang tinggi dari berbagai peran yang ada di dalam sistem politik itu sendiri. Setidaknya untuk memenuhi itu ada beberapa syarat yang bernilai sangat penting bagi proses transisi menuju sistem demokrasi. *Pertama*, civil society yang bebas dan aktif. *Kedua*, masyarakat politik, termasuk elit parpol-parpol, yang relatif otonom. *Ketiga*, penegakan hukum. *Keempat*, birokrasi yang profesional. *Kelima*, masyarakat ekonomi yang relatif otonom dari negara dan pasar murni.

Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis pada saat Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Partai politik dan elit politik tidak hanya tergantung pada kekuatan yang berada di luar kerangka sistem politik. Namun demikian justru muncul persoalan baru dalam menjalankan roda Partai Politik secara mandiri. Sebab elit politik belum memiliki kemampuan untuk mempercayai dirinya sendiri dalam menentukan sikap, termasuk sangat bergantung pada *backing* seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Budaya *backing* tersebut menjadi penyebab lemahnya partai politik serta kaum elit politik untuk bersikap otonom dalam menentukan proses kompetisi politik.²¹

Dalam situasi tersebut Amien Rais muncul membawa visi misi politik yang disebut lahir sebagai ijthad politik. Amien mendeklarasikan PAN sebagai terobosan politik untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, penghapusan isu SARA, respon terhadap permasalahan sosial dan stabilitas ekonomi. Amien juga menegaskan jika berhasil membawa PAN sebagai nahkoda kepemimpinan maka lepaslah segala sentimen terhadap golongan ataupun komunitas, sebab kepemimpinan seyogyanya untuk kepentingan bersama.²²

Meskipun demikian jauh sebelumnya pada saat Amien menawarkan gagasan Politik kualitas tinggi (*high politics*) di dalamnya sudah digagas kata kunci mengimplementasikan politik yang luhur, adi luhung dan berdimensi etis. Menurut Amien, dalam tataran realitas, gagasan tersebut bisa dibuktikan dengan suatu tindakan responsif sebagai sikap yang tegas terhadap korupsi, mengajak masyarakat luas untuk memerangi ketidakadilan, menghimbau pemerintah untuk terus menggelindingkan proses demokratis dan keterbukaan, maka organisasi tersebut pada hakikatnya sedang memainkan *high politics*.

²¹Endang Komara, *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*, dalam *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Vol. 2 (2), 2015, hal. 122.

²² Muhammad Najib, *Melawan Arus: Pikiran Dan Langkah Politik Amien Rais*. h. 35

Amien Rais mengemukakan tiga ciri *high politics*: *Pertama*: setiap jabatan politik pada hakikatnya merupakan amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Sebagai amanah, tidak boleh disalahgunakan, misalnya untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan golongannya saja dan menelantarkan kepentingan umum. *Kedua*, setiap jabatan politik memiliki pertanggungjawabannya. Argumen yang dibangun untuk memperkuat gagasannya itu, Amien Rais merujuk pada ajaran Nabi Muhammad yang menegaskan bahwa setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan dan tugas-tugasnya. *Ketiga*, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip *ukhuwah*, yakni persamaan di antara umat manusia. Dalam arti luas, *ukhuwah* melampaui batas-batas etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, keturunan dan sebagainya.²³

Sedangkan kebalikannya, *Low Politics* (politik kualitas rendah) dalam pandangan Amien Rais, dipahami sebagai politik yang tidak mendukung maksud-maksud dakwah, tetapi justru menjegal dakwah, bahkan pada hakikatnya mereka sebenarnya merusak rekonstruksi masyarakat yang Islami. Ada tiga ciri-ciri yang melekat pada pelaksanaan *low politics*: *pertama*, kekerasan (*violence*), brutalitas dan kekejaman yang keduanya merupakan cara-cara yang seringkali perlu diambil oleh penguasa dan dapat digunakan kapan saja, asalkan tujuan yang dikejar bisa tercapai. *Kedua*, penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai puncak (*summum bonum*). Musuh tidak boleh diberi kesempatan untuk bangkit, bahkan kalau perlu diperlakukan sebagai barang bukan manusia. *Ketiga*, dalam menjalankan kehidupan politik, seorang penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas, terutama seperti singa dan sekaligus anjing pemburu yang cerdik untuk mengenali pelbagai perangkap dan harus dapat menjadi singa yang buas untuk membuat takut musuh-musuhnya.

High politics juga memberikan penegasan bahwa dalam hal berpolitik tetap memegang teguh prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan demikian pada konteks riilnya, Muhammadiyah selalu mengambil peran secara arif dan bijaksana sebagai usaha ikut memerankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Tentu saja di sini fungsi kontrol tidaklah sama penerapannya dengan fungsi kontrol seperti yang dimiliki oleh lembaga-lembaga legislatif. Untuk hal ini, Amien Rais menyatakan:

“Muhammadiyah menyatakan secara tegas bahwa Muhammadiyah mendukung pemerintah bukan tanpa *reserve*. Maksudnya bahwa dukungan Muhammadiyah terhadap pemerintah tentunya bukan dukungan buta, melainkan dukungan bersyarat. Tidak hanya

²³ Auri Adam, “High Politics Sebagai Kerangka Moral Pemikiran Politik Muhammadiyah.” h. 45

sekarang, sesungguhnya sejak dulu, sesungguhnya hal itu merupakan sikap moral politik Muhammadiyah. Kalau pemerintah lurus, dalam artian masih berorientasi kepada kerakyatan, mengasah dan mempertajam keberanian moralnya untuk mengatasi korupsi dan menanggulangi kolusi, maka Muhammadiyah akan terus memberi dukungan. Namun apabila di masa-masa mendatang ternyata pemerintah tidak sanggup lagi menanggulangi korupsi dan mengatasi kolusi, maka Muhammadiyah hanya bisa mendoakan.”²⁴

Dalam pernyataan Amien Rais ini, *high politics* selalu mengacu pada pendekatan moralitas dalam menghadapi berbagai fenomena sosial seperti korupsi dan kolusi. Di samping itu, sikap yang kritis dan kooperatif tetap selalu dijalankan oleh Muhammadiyah terhadap penyelenggara roda kehidupan berbangsa dan bernegara oleh pemerintah. Artinya, bahwa dalam tahap implementasi, Muhammadiyah akan mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, tetapi sebaliknya, akan mnegkritisi apabila kepentingan serta kebutuhan masyarakat dirasa justru diabaikan oleh pemerintah.

Dalam tahapan implementasi ini pula, menurut Haedar Nashir, sebagaimana yang dikutip oleh Auri Adam, konsep *high politics* dalam konteks Muhammadiyah dapat dilihat pada tiga hal: *Pertama*, pada konsep *khittah*. Konsep *khittah* pada intinya adalah pada sikap netralis Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan dan kepentingan politik, yang memberi kemungkinan untuk tetap bisa menjaga jarak dan afiliasi (keberpihakan) politik pada kekuatan-kekuatan politik yang ada, juga menjadi subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik itu di Indonesia.

Kedua, pada konteks supremasi nilai mengarah pada konteks yang lebih substantif (mendasar). Artinya konsep *high politics* memiliki makna pada makna bagaimana moral itu selalu memiliki dasar dalam menentukan langkah-langkah politik, sehingga ada batas-batas yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. *Ketiga*, pada konteks aktif mendorong terjadinya pendekatan yang pada dasarnya merupakan kendali mekanisme internal bagi para pelaku politik di Muhammadiyah untuk tidak terjebak pada permainan riil politik (politik praktis).

Melihat konsep *high politics* ini, jelas terlihat bahwa pedoman umum yang terlihat dalam *high politics* adalah pentingnya aspek moralitas pada diri seorang aktor politik dalam menjalankan sebuah kekuasaan. Aspek moral yang dimaksud adalah sikap tidak berpihak pada kelompok atau kekuatan politik manapun, kecuali kelompok atau kekuatan politik yang benar-

²⁴ Auri Adam, “High Politics Sebagai Kerangka Moral Pemikiran Politik Muhammadiyah.” h. 45-46

benar mampu menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tetapi keberpihakan ini hanya akan langgeng jika nilai-nilai kebenaran dan keadilan selalu diwujudkan dalam pelaksanaan kekuasaan.

Di sisi lain, aspek moralitas yang juga terkandung dalam *high politics* adalah keinginan untuk tidak terlibat secara langsung dalam permainan politik, namun hanya sekedar menjadi penonton aktif yang selalu mengkritisi setiap kebijakan politik yang dianggap melenceng dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Meskipun penggagasnya pada tahun 1998 secara resmi mendeklarasikan diri sebagai petinggi politik, namun beberapa pemikirannya tetap hendak membawa Parpol yang dinahkodainya sebagai sarana menjalankan amanah dengan berpegang teguh pada kemaslahatan.

Pada saat digagas, menurut Amien Rais, *high politics* merupakan suatu pendekatan mengenai masalah-masalah politik yang bermuatan moral dan etika. Artinya, *high politics* tidak mendekati politik dengan kaca mata kekuasaan dan tidak bermaksud untuk memperoleh cuilan-cuilan kekuasaan, tetapi justru akan melempangkan secara moral, kekuasaan yang menyeleweng dari tujuan seharusnya. Sebuah pendekatan *high politics*, berarti bahwa kekuasaan harus digunakan untuk mengayomi masyarakat, untuk mendorong berbagai macam kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan bukan sebaliknya, menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk melakukan korupsi, menumpuk kekayaan dan menyengsarakan rakyat.

Dari konsep *high politics* yang di kemukakan oleh Amin Rais ini, lagi-lagi mengandung makna hakiki yang menjurus adanya muatan moralitas dan etika dalam menjalankan kekuasaan, sehingga sangat tidak etis apabila seorang aktor politik sedang berkuasa, sementara kekuasaan itu justru digunakan untuk kepentingan diri dan golongannya sendiri. Perilaku-perilaku yang mengarah pada terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), jelas sangat bertentangan dengan moralitas yang terkandung dalam *high politics*.

Selaras dengan konsep dari Amien Rais, menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, konsep *high politics* sebagai suatu cara berpolitik yang dibimbing oleh nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang luhur, yang bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang juga ditegakkan di atas landasan moral. Berdasarkan konsep *high politics* dari Ahmad Syafi'i ini, menyimpulkan bahwa dalam berpolitik, harus mengedepankan nilai-nilai moral dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat, merupakan upaya yang tepat agar aktor politik dapat selalu

berpolitik secara baik, dengan selalu mengindahkan kebutuhan masyarakat, sekaligus menaati aturan yang ada.²⁵

High politics bukanlah suatu hal yang sifatnya permanen, tetapi sekadar bentuk ijtihad yang tentu saja digunakan untuk menjawab tantangan pada zamannya. Munculnya penekanan *high politics* pada bentuk ijtihad secara tidak langsung telah mengarahkan jalannya kekuasaan agar tidak keluar dari bingkai Islam yang memang menghendaki agar manusia selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an, yakni mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran.

2. *High Politics* dalam Perspektif Hamka

Kajian tentang pemikiran politik pandangan Hamka sebenarnya telah diteliti secara khusus oleh Ahmad Hakim dan M. Thalhah yang menyebutkan ada beberapa pemikiran politik Hamka yang merupakan uraian langkah-langkah yang berada pada konteks politik, di antaranya berkaitan dengan konsep *Syura*. Hamka menjelaskan bahwa *Syura* yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dengan sistem demokrasi Indonesia adalah merupakan pokok pembangunan Negara dan dasar politik dari suatu pemerintahan.

Dalam hal pelaksanaannya, Hamka tidak memberikan batasan tetapi Hamka menggarisbawahi pada keadaan ruang dan waktu yang senantiasa mempengaruhi segala sesuatu yang baru. Karena tidak adanya mekanisme yang baku tentang pelaksanaan musyawarah dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan demikian sangat dimungkinkan adanya ijtihad untuk menentukan secara teknis bentuk *syura*. Menurut Hamka pada zaman Rasulullah sebenarnya pelaksanaan musyawarah ini sudah dilaksanakan oleh Nabi ketika memimpin Negara Madinah²⁶ dan bahkan jauh sebelumnya pada saat beliau masih di Makkah sudah melaksanakan sebagian musyawarah.²⁷

Pemikiran Hamka terhadap konteks politik juga dituangkan dalam keterlibatan Hamka di Muhammadiyah. Khususnya saat dirinya ditunjuk sebagai anggota Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 1953-1956 di Mukhtar 32 Purwokerto. Di antara poin yang dibicarakan pada saat itu adalah sikap Muhammadiyah terkait Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 1955. Secara politik saat itu Muhammadiyah sebagai anggota istimewa dalam tubuh Partai Masyumi, sebab pada tahun 1952, kelompok NU keluar dari partai tersebut. Kemudian

²⁵ Auri Adam, "High Politics Sebagai Kerangka Moral Pemikiran Politik Muhammadiyah." h. 47

²⁶ Ahmad Hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka* (Yogyakarta: UII Press, 2005). h. 123

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015). Juz. IV, h. 104

untuk menyikapi itu, Hamka bersama tiga orang lainnya mengadakan pembicaraan khusus yang hasilnya mendorong Muhammadiyah kembali pada khittah, tanpa melarang anggotanya terjun pada politik praktik namun mewajibkan ikut pada Partai Islam Masyumi.²⁸

Hamka terlibat pada beberapa rangkaian acara penting dalam mengukuhkan Muhammadiyah dari respon situasi perpolitikan saat itu, khususnya di era sistem demokrasi terpimpin yang mengharuskan Partai Masyumi bubar. Hamka terlibat aktif dalam menyusun ulang Anggaran Dasar Muhammadiyah untuk memperkuat visi misinya sesuai dengan gagasan pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan. Sebagai persiapan Muktamar ke 35 di Jakarta, Hamka tercatat pernah menjadi anggota penting yang ditugaskan oleh KH. Fakhri Usman untuk merumuskan kembali identitas Muhammadiyah atas permintaan dari para anggota Muhammadiyah sebagai pedoman bersikap menghadapi peristiwa politik saat itu.

Sistem politik di Indonesia mengalami dinamisasi sehingga menjadi pemantik munculnya beragam pemikiran termasuk pandangan politik berbasis keagamaan. Dalam kenyataannya kita dapat menjumpai perbedaan-perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari satu periode ke periode yang lain, misalnya: sistem politik demokrasi liberal, sistem demokrasi terpimpin, sistem demokrasi Pancasila. Sedangkan falsafah negara tetap tidak berubah, meskipun demikian eksistensi Pancasila seringkali mewarnai dinamika perpolitikan, seperti munculnya kelompok yang menentang Pancasila.

Penyebab adanya perbedaan bahkan gejala bertolak belakang antara cita-cita dan implementasinya. Fakta tersebut mendorong untuk membicarakan adanya kemungkinan kenapa Pancasila posisinya tidak kuat mengikat masyarakat. Menurut Sukoco, bisa jadi ada dua kemungkinan yang harus dipertimbangkan dan diselidiki lebih lanjut, yaitu: (1) falsafah tidak banyak berpengaruh terhadap sistem politik, artinya juga tidak berpengaruh terhadap aktor (perilaku) politik; atau (2) belum ditemukan standar dan model sistem politik Indonesia yang sesuai dan menyangga (mendukung) cita-cita.²⁹

Misalnya berkaca dari sistem politik yang terjadi di Indonesia secara periodik. Sistem demokrasi pertama yang dianut oleh Indonesia dikenal dengan demokrasi liberal berlangsung sejak 3 November 1945, yaitu sejak sistem multi partai berlaku melalui Maklumat Pemerintah. Sistem multi-partai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem

²⁸ Tendy Choerul Kamal dan Agus Mulyana, "Peranan Buya Hamka Dalam Pembaharuan Muhammadiyah Tahun 1925-1966." h. 221

²⁹Manik Sukoco, *Kajian Sistem Pemerintahan dan Politik di Indonesia*, (Malang: Makalah UM-FIS, 2012), hal. 23.

parlementer dalam naungan UUD 1945 periode pertama. Demokrasi liberal dikenal pula demokrasi-parlementer, oleh karena berlangsung dalam sistem pemerintahan parlementer ketika berlakunya UUD 1945 periode pertama, Konstitusi RIS dan UUDS 1950.³⁰

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem Demokrasi Parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akhirnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun sangat rentan pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang berlangsung. Persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat telah mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri.

Faktor-faktor disintegratif, ditambah dengan kegagalan partai-partai dalam Majelis Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru. Dengan demikian, mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden yang menegaskan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945. Demokrasi liberal di Indonesia secara formal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959,³¹ sedangkan secara material berakhir pada saat gagasan Demokrasi Terpimpin dilaksanakan, antara lain melalui pidato Presiden di depan Konstituante tanggal 10 Nopember 1956 atau pada saat Konsepsi Presiden tanggal 21 Pebruari 1957 dengan dibentuknya Dewan Nasional.³²

Setelah demokrasi liberal dikenal dengan demokrasi terpimpin ini konon banyak pemikiran demokrasi Barat yang ditinggalkan. Tokoh politik Soekarno yang memegang pimpinan nasional ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal (demokrasi-parlementer) tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Prosedur pemungutan suara dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan pula sebagai tidak efektif dan ia kemudian memperkenalkan apa yang disebut musyawarah untuk mufakat. Sistem multi-partai oleh tokoh politik tersebut dinyatakan sebagai salah satu penyebab inefektivitas pengambilan keputusan, karena masyarakat lebih didorong ke arah bentuk yang fragmentaris. Demokrasi ini berlaku sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 11 maret 1966. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini, kemudian dibentuk badan yang disebut front nasional. Periode ini disebut pula periode pelaksanaan UUD 1945 dalam keadaan ekstra-ordiner, disebut demikian karena terjadi

³⁰Manik Sukoco, *Kajian Sistem Pemerintahan dan Politik di Indonesia*, hal. 24.

³¹A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, cet. 5, hal. 75.

³²Manik Sukoco, *Kajian Sistem Pemerintahan dan Politik di Indonesia*, hal. 24.

penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan itu misalnya Presiden membubarkan DPR, Badan Konstituante, dan sebagainya.³³

Demokrasi Terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Presiden Soekarno ibarat seorang ayah dalam sebuah keluarga besar bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat di tangannya. Namun, kesalahan terbesar dalam Demokrasi terpimpin model Presiden Soekarno adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri, yakni lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin, dan pada saat yang sama hilangnya kontrol sosial dan *check balance* dari legislatif terhadap eksekutif.³⁴

Terakhir dikenal dengan demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. *Pertama*, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. *Kedua*, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. *Ketiga*. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya adalah bahwa pada pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal yang sangat disayangkan adalah, alih-alih pelaksanaan ajaran pancasila secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru baru sebatas retorika politik. Dalam praktik pemerintahan dan negaranya, pemerintah Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.³⁵

Penelaahan terhadap Demokrasi Pancasila tentu tidak dapat bersifat final di sini, karena masih terus berjalan dan berproses. Dalam demokrasi Pancasila sampai dewasa ini penyaluran berbagai tuntutan yang hidup dalam masyarakat menunjukkan keseimbangan. Pada awal pelaksanaan sistem politik ini dilakukan penyederhanaan sistem kepartaian, muncullah satu kekuatan politik yang dominan, yaitu Golkar dan ABRI. Dalam perjalanan PEMILU berikut sejak, setelah orde reformasi, bermuncullah partai politik, yang ketika masa Orde Baru melebur ke tiga partai besar yaitu Golkar, PPP dan PDI. Hingga munculnya Amandemen terhadap UUD 1945, falsafah Negara yaitu Pancasila yang masih tetap tidak berubah, bahkan dipertahankan sebagai hukum dasar nasional (TAP No. III/MPR/2000). Kegagalan tiga partai besar dalam perannya sebagai lembaga kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan tidak berfungsinya *check and balance*, akibat terpolanya sistem politik kompromistis dari elit politik, justru tidak mencerminkan wakil rakyat yang sesungguhnya. Karena itulah muncul ketidakpuasan rakyat,

³³Manik Sukoco, *Kajian Sistem Pemerintahan dan Politik di Indonesia*, hal. 24.

³⁴A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, hal. 76.

³⁵A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, hal. 77.

dan muncullah gerakan reformasi, salah satu dampaknya adalah lahir kembali partai-partai kecil. Partai-partai kecil ini ada yang murni berdiri tanpa melalui induk semangnya, tetapi ada yang memisahkan dari induknya.³⁶

Dalam pemerintahan Orde Baru, yang menyatakan mengembangkan Demokrasi Pancasila, elit penguasa berperan sebagai pelaku utama kontrol dan pengawasan terhadap proses politik dalam masyarakat. Hal ini tampak pada peran birokrasi baik sipil maupun militer sangat menonjol. Militer dan teknokrat memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan sosial, ekonomi dan politik baik pada tingkat nasional maupun lokal. Para pengamat politik Indonesia pada umumnya sepakat bahwa birokrasilah yang menjadi tulang punggung utama sistem politik Orde Baru sehingga disebut sistem politik birokratik (*bureaucratic politic*).

Pengembangan sistem politik birokratik dapat menciptakan pemerintahan yang stabil dan mampu memelihara integritas nasional sebagai landasan pembangunan tetapi dengan menekan kekuatan-kekuatan demokrasi. Penekanan itu misalnya dengan penerapan kebijakan perampangan partai politik, depolitisasi massa lapis bawah, pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional, dihapuskannya pluralisme ideologi dengan menjadikan Pancasila sebagai satu satunya asas. Penekanan juga tampak dengan dipertontonkan adanya pelarangan, pembatasan-pembatasan terhadap mereka yang dicap radikal atau mereka yang dianggap membahayakan kepentingan nasional.

Seperti yang diterapkan pada individu maupun kelompok bekas tokoh partai terlarang (PKI, Masyumi, PSI), mantan Tapol/Napol, kelompok Islam garis keras, warga negara non pribumi, khususnya China, dan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kelompok yang berbeda/berseberangan dengan kehendak penguasa Orde Baru. Individu maupun kelompok tersebut, harus selalu diwaspadai karena berbahaya atau merupakan penyakit bagi stabilitas nasional. Bahkan kalau perlu tidak sekedar diwaspadai tetapi diberantas. Dalam rangka melakukan kewaspadaan ini, cara yang dilakukan misalnya, dengan memberlakukan litsus, *screening*, wajib lapor, KTP bertanda khusus, dan lain-lain. Jika dianggap perlu, praktik-praktik seperti penghilangan atau penculikan serta penyiksaan pun akan dilakukan.³⁷

Beberapa poin penting yang dibicarakan oleh Hamka dalam karya Tafsirnya antara lain sistem politik, yang baginya adalah mengedepankan unsur musyawarah. Fakta ini bisa dilihat

³⁶Manik Sukoco, *Kajian Sistem Pemerintahan dan Politik di Indonesia*, hal. 25.

³⁷Cholisin, *Mengembangkan Partisipasi Warga Negara dalam Memelihara dan mengembangkan Sistem Politik Indonesia*, dalam *Jurnal Civis*, Vol. 6. No. 1, Juni, 2015, hal. 31.

ketika Hamka menafsirkan ayat 159 dalam surah Ali Imran, Hamka memberikan keterangan lebih lanjut sebagaimana berikut:

“Dengan ayat yang tengah kita tafsirkan ini yang didahului pula oleh ayat 38 dalam surah al-Syura jelaslah bahwa musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. Inilah dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara, masyarakat dalam perang dan damai, ketika aman atau ketika terancam bahaya.”

Lanjutan dari keterangan tersebut, Hamka juga memberikan penegasan bahwa ayat 159 dan Al-Syura 38 menanamkan prinsip jika bernegara dan bermasyarakat haruslah bermusyawarah yang diimplementasikan mulai dari desa kecil, desor besar, kota kecil hingga konteks negara bahkan suatu jamaah kecil yang ada di lorong. Hamka juga mengkritik praktik monarki atau pemerintahan tunggal yang memosisikan pemimpin laksana dewa yang dilakukan dari Bani Umayyah dan diteruskan oleh Abbasiyyah hingga Turki Usmani.³⁸

Model pemerintahan yang dituliskan oleh Hamka ketika menafsirkan ayat tersebut yaitu model pemerintahan yang menjalankan sistem musyawarah. Menurutnya sistem pemerintahan seperti demikian merupakan esensi dari pemerintahan yang berbudi luhur. Dengan demikian karakter pemimpin yang bisa disebut ulil amri menurut Hamka juga harus patuh pada moral-moral yang baik, termasuk mengedepankan kemaslahatan bersama. Hamka memberikan penegasan jika karakter orang beriman setelah patuh pada perintah Allah dan rasul, maka dituntut pula patuh kepada ulil amri.

Hamka ketika menafsirkan surah al-Nisa ayat 59, memberikan diskripsi bahwa yang dimaksud dengan ulil amri ialah orang-orang yang menguasai pekerjaan, juga orang-orang yang berkuasa atau penguasa. Syarat ulil amri yang harus dipatuhi haruslah *minkum*, yakni dari pada kamu.³⁹ Dengan kata lain, pemimpin berkuasa karena dipercaya atau diberi amanat dan dipilih melalui sistem pemilihan (Pemilu).

Tugas utama dari ulil amri menurut Hamka adalah menjaga hasil dari keputusan musyawarah yang harus dibedakan antara kepentingan agama dan kepentingan dunia. Ia mengutip apa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya dalam hal urusan dunia seperti strategi perang, rasul tidak segan-segan meminta pendapat dengan para sahabatnya yang

³⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*. Juz. IV, h. 106

³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*. Juz. V, h. 340

ahli. Selain itu ulil amri harus memiliki keberpihakan terhadap umat dalam menjalankan perintah agamanya, seperti membantu pelaksanaan ibadah haji.

Hamka juga berpandangan bahwa ulil amri yang wajib dipatuhi bukanlah berasal dari kalangan ulama atau agamawan saja, tetapi termasuk di dalamnya adalah panglima-panglima perang dan penguasa-penguasa besar, petani-petani dalam negara. Hamka juga mengutip pendapat Abdul bahwa di zaman modern ini kelompok-kelompok yang bisa dijadikan sebagai patron dalam bermusyawarah seperti anggota dewan bisa dari kalangan direktur-direktur pengusaha besar, profesor-profesor, sarjana-sarjana di berbagai bidang, dan wartawan.⁴⁰

Dari penegasan tersebut, Hamka hendak memberikan penegasan jika yang dimaksud sebagai ulil amri yang harus ditaati bukan hanya mereka yang berasal dari kalangan agama saja, melainkan apapun latar belakang pendidikannya selama ia menjadi pemimpin maka harus ditaati. Adapun jika terjadi perselisihan antara pemimpin dengan permasalahan agama maka hendaknya dimusyawahkan dengan baik yang masing-masing harus mengacu pada kemaslahatan.

Dalam kacamata sosiologi pengetahuan dapat disimpulkan bahwa secara umum penafsiran Hamka terhadap ayat yang berkenaan dengan perintah taat kepada pemimpin. Hamka tidak menyinggung secara langsung bagaimana pandangan Islam terhadap kondisi masyarakat Islam ketika itu, terutamanya dalam hal menaati pemimpin, Hamka tidak menjelaskan secara nyata, kepada siapa umat Islam Indonesia harus taat, setelah Allah dan Rasul. Hanya saja, di akhir penafsiran Hamka mengatakan bahwa yang disampaikannya dalam penafsiran ayat 59 surat al-Nisa' tersebut adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi kemajuan pembangunan bangsa Indonesia ketika itu.

Hamka menghubungkan dengan konteks global, dan tidak menghubungkan dengan konteks sosial keindonesiaan ketika itu. Namun jelas sekali ada kecenderungan dari Hamka jika dirinya tidak sepakat pada perilaku sewenang-wenang dari penguasa termasuk mengabaikan konsep musyawarah. Bisa jadi apa yang dituliskan oleh Hamka merupakan bentuk preventif dalam menjaga diri dari perlakuan yang tidak baik dari penguasa. Sehingga penekanan pada ulasannya tersebut ditegaskan jika tujuan dari politik Islam itu adalah membawa kepentingan bersama, atau kepentingan manusia, bukan sekedar kepentingan bangsa, kelompok, atau agama tertentu. Prinsip demikian juga diungkapkan oleh Buya Hamka ketika memberikan uraian tentang tugas manusia menjadi khalifah atau pemimpin.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*. Juz. V, h. 344

Kerangka berbudi luhur tersebut sudah mencakup karakter yang masuk pada karakter *high politics* berikutnya, yaitu *adiluhung*. Sikap *adiluhung* ini berasal dari bahasa Jawa yang bermakna “luhur.” Namun saat ini sudah diadopsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah “bermutu tinggi.” Dalam prinsip *High Politics* yang digagas oleh Amien Rais, *adiluhung* atau bermutu tinggi ini juga digunakan untuk membangun bagaimana bisa menciptakan politik yang bermutu tinggi. Karena ia juga menggarisbawahi dengan adanya politik yang bermutu rendah. Di antara indikasi yang ia ungkapkan atas politik rendah itu adalah, politik yang dilakukan justru bertentangan dengan misi dakwah, bahkan juga merusak rekonstruksi masyarakat islami.⁴¹

Argumen tersebut dibangun Amien Rais untuk mengatakan jika politik harus menjadi sarana dakwah artinya politik dan dakwah tidak bisa didikotomisasikan. Ia juga mendukung jika Muhammadiyah dengan prinsip-prinsip yang diadopsi juga komitmen pada orientasi tersebut. Namun narasi yang dibangun oleh Amien Rais sepertinya condong terhadap pemerintahan yang saat itu dikuasai oleh elit tertentu.⁴² Tetapi di sisi lain gagasannya itu dijadikan sebagai upaya preventif jika politik di Indonesia dikuasai oleh kelompok sekuler yang berorientasi hanya pada keuntungan duniawi saja, sedangkan agama pada kemaslahatan umum.

Pada konteks *adiluhung* ini berkerangka pada politik cum dakwah. Pelaku politik tidak boleh lepas dari prinsip tersebut yang tetap menggunakan moral dalam berpolitiknya. Meskipun yang dituju adalah kekuasaan, tetapi haruslah tetap berlandaskan pada asas-asal moral yang baik. Begitu juga ketika sudah menjalankan moda jabatan, maka cara-cara yang digunakan harus baik pula.

Berbeda dengan Amien Rais, dalam konteks dakwah Hamka lebih berbicara pada strategi kontekstual terhadap obyek yang didakwahkan. Gagasan demikian dapat dilihat ketika Hamka menafsirkan surah al-Nahl ayat 125. Menurut Hamka, dari ayat tersebut dapat dipandang terdapat 3 metode dakwah yang relevan. *Pertama*, hikmah. *Kedua*, memberi nasihat yang baik. *Ketiga*, berdebat dengan cara yang baik. Hamka juga memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan tiga cara dakwah yang dianggap tepat tersebut.

Hikmah menurut Buya Hamka merupakan strategi dakwah yang mengedepankan kebijaksanaan, akal budi yang mulia, dada yang lapang dan hati yang bersih untuk menarik orang kepada agama atau kepercayaan kepada Allah. Hikmah bagi Hamka juga diposisikan lebih tinggi daripada filsafat, sebab tidak hanya pada konteks berpikir yang bijak tetapi juga

⁴¹ Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita Dan Fakta*. h. 32

⁴² Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1999). h. 299

bertindak secara bijak. Sedangkan yang dimaksud dengan memberi nasihat ialah memberikan pendidikan yang tepat. Hamka dalam poin ini memberikan contoh pendidikan yang diberikan oleh kedua orangtua yang dijadikan contoh anak-anaknya dalam keluarga. Menurut Hamka peranan pendidikan juga dapat diterapkan di Perguruan Tinggi dan lainnya.

Selanjutnya cara yang arif dalam berdakwah pada poin ketiga juga dimakanai Hamka sebagai upaya debat dengan cara yang sangat baik. Menurutnya jikapun terjadi polemik maka harus dipilih jalan yang terbaik, sebab cara terbaik bisa menentukan hasil yang baik pula. Oleh sebab itu, Hamka menguatkan jika tiga strategi di atas bisa diterapkan di segala zaman. Karena dakwah merupakan seruan untuk mengajak manusia kepada menuju jalan kebenaran. Dalam hal ini Hamka jika tidak memungkiri jika propaganda terkadang tidak bisa dipisahkan dari dakwah nama hal itu menurutnya sama sekali jauh dari prinsip Islam yang tidak kenal adanya propaganda, sebab propaganda sifatnya memaksa sedangkan dakwah menyampaikan. Sedangkan Al-Qur'an menegaskan dalam konteks agama tidak boleh ada paksaan.⁴³

Ketika menafsirkan ayat dakwah ini, Hamka sama sekali tidak menyinggung persoalan politik, tetapi lebih pada konteks dakwah yang bersifat mengajak dan harus dilakukan memenuhi tiga etika tersebut. Tampaknya uraian yang diungkapkan oleh Hamka terkait dengan dakwah dalam ayat tersebut sebagai bentuk cara yang bisa digunakan dalam berdakwah sehingga bisa mendapatkan hasil yang relevan. Karena Hamka beranggapan bahwa yang dimaksud dengan dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang pada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi pada aktivitas yang memerintahkan amar makruf nahi mungkar.⁴⁴

Mempertimbangkan pemikiran Hamka terkait dakwah yang demikian itu apakah Hamka tidak menyinggung persoalan politik sama sekali? Untuk mendapatkan jawaban atas persoalan tersebut perlu mengaitkan dengan sejarah sosial Hamka secara lengkap. Faktanya Hamka tidak lepas dari diskursus politik baik terlibat langsung ataupun secara teoritis. Salah satu contohnya ketika ia menafsirkan surah al-Balad saat memberikan contoh tentang golongan kanan dan golongan kiri.

Hamka mencontohkan bagaimana ketua Masyumi Sumatera Barat pada revolusi tahun 1947 saat itu menjadikan kandungan surah al-Balad ini sebagai dasar prinsip organisasi tersebut. Menurut yang dituliskan Hamka, ketua Masyumi Sumatera Barat yang bernama

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*. h. 236

⁴⁴ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jakarta: Rajawali Saputra Press, 2011). h. 1

Darwis Thaib memandang bahwa kandungan surah al-Balad merupakan dasar untuk ajaran keadilan sosial yang bersumber dari wahyu yang berprinsip pada 3 ajaran: pertama, memberantas segala bentuk perbudakan, pemerasaan manusia atas sesama manusia. Kedua, memberi makan pada saat orang lain memerlukannya baik dari kalangan anak-anak yatim, ataupun orang miskin. Ketiga, didasari atas keimanan yang dibentuk oleh komunitas (jamaah) yang hidup dalam gotong royong, saling berpesan tentang kesabaran serta hidup berkasih sayang, bantu membantu dan tolong menolong.

Hamka sangat membela atas gagasan tersebut yang ia tegaskan pernah menjadi ideologi Marhamisme sebagai rival dari Marheanisme ciptaan Soekarno. Di sini tampak sekali keberpihakan Hamka yang tidak sejalur dengan gagasan Soekarno dan cenderung mengupas bahwa ideologi Marheanisme yang digawangi oleh Soekarno itu binaan kelompok komunis. Hamka juga mengurai latar belakang gagasan Marhamisme yang diadopsi dari kata *marhamah* dalam surah al-Balad oleh Darwis Thaib itu hasil didikan dari Hatta yang menitik beratkan pada pendidikan karakter.

Menariknya karakter yang dituliskan Hamka sebagai ajaran dari Moh. Hatta kepada Darwis Thaib tadi merujuk pada konsep Pendidikan Nasional yang dominan pada pendidikan politik, memperdalam kesadaran nasional, dan kesediaan berkorban untuk cita-cita. Sebab, gagasan itu memang dipandang Hamka perlu diperjuangkan dalam konteks memperjuangkan kemerdekaan saat itu.⁴⁵

KESIMPULAN

Kerangka *high politics* gagasan Amien Rais yang ditawarkan agar diadopsi sebagai kerangka berpikir Muhammadiyah menerapkan prinsip menuju suatu gerakan yang tidak mendikotomisasikan antara dakwah dan politik. Sedangkan Hamka tidak secara terang-terangan memberi penegasan sebagaimana yang dimaksud oleh Amien Rais, tetapi melalui ayat-ayat yang berbicara tentang dakwah dan sistem politik yang ditafsirkan memiliki kesamaan orientasi, yaitu menjadikan politik ataupun dakwah sebagai sarana membangun kemaslahatan umum serta amar makruf nahi munkar, meskipun keduanya berada pada momen sosial politik yang berbeda. Demikian halnya dengan sistem negara, keduanya juga memiliki kesamaan yang melihat sistem negara sebagaimana diajarkan oleh Islam itu mengedepankan musyawarah atau demokratis dan tidak sentralistik. Dua pandangan yang lahir di era berbeda

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*. Juz. IX, h. 587-589

ini sama-sama berkelindan dengan dinamika di Organisasi Muhammadiyah yang dihadapkan pada suasana politik yang tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zawawi. "Politik Dalam Pandangan Islam." *Ummul Qura* 5, no. 1 (2015).
- Ahmad Hakim dan M.Thalhah. *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Amien Rais. *Cakrawala Islam: Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan, 1999.
- Auri Adam. "High Politics Sebagai Kerangka Moral Pemikiran Politik Muhammadiyah." *Bestari*. Malang, 1999.
- Burnuddin Yusuf. "Politik Dalam Islam: Makna Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)." *Aqidah-TA* 4, no. 1 (2018).
- Gustav Brown dan Amelia Fauzia. "Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-Making in Indonesia." *Asia Studies Review* 43, no. 19 (2019).
- Haedar Nashir, dkk. "Muhammadiyah's Moderation Stance in the 2019 General Election." *Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (2019).
- Hamka. "Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, no. 1 (2020).
- . *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Karl Mannheim. *Ideology and Utopia*. London: Routledge, 1960.
- Kasman Bakry, Ambo Asse, Darussalam Syamsuddin, Salenda, Kasjim, and Roziana Shaari. "Political Dynamics of Muhammadiyah and Its Relevance to the Concept of the State in Islam." *al-'Adalah* 17, no. 2 (2020).
- Muhammad Najib. *Amien Rais: Dari Yogya Ke Bina Graha*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- . *Melawan Arus: Pikiran Dan Langkah Politik Amien Rais*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1999.
- Ng. Philipus dan Nurul Aini. *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ricklefs, M C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Yogyakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Sahya Anggara. *Pengantar Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Siti Mariatul Kiptiyah. *Warisan Islam Nusantara: Tafsir Al-Qur'an Carakan Dan Narasi Reformisme*. Semarang: eLSA Press, 2020.

Tendy Choerul Kamal dan Agus Mulyana. "Peranan Buya Hamka Dalam Pembaharuan Muhammadiyah Tahun 1925-1966." *Factum* 8, no. 2 (2019).

Wahidin Saputra. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Saputra Press, 2011.